

MERDEKA BELAJAR BAGI ANAK KEBUTUHAN KHUSUS DI SLB MADIUN

Diterima:

20 Desember 2023

Revisi:

2 Januari 2024

Terbit:

14 Januari 2024

¹ Rizki Aningrum, ² Suyanto, ³ Galuh Hasna Era Paramesti

^{1,2,3} Universitas Doktor Nugroho Magetan

^{1,2,3} Magetan, Indonesia

E-mail: ¹Rizkianingrum@udn.ac.id

Abstract—*The Independent Learning Policy is a national educational innovation that emphasizes flexibility, independence, and the development of students' potential according to their characteristics. Implementing this policy faces unique challenges when applied to the education of children with special needs (ABK) in Special Needs Schools (SLB). This study aims to describe the implementation of Independent Learning for ABK at SLB Madiun and identify supporting and inhibiting factors. The study used a descriptive qualitative approach, with principals, teachers, and students as subjects. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of Independent Learning at SLB Madiun has been tailored to the individual needs of students through differentiated learning, curriculum flexibility, and an individualized approach based on the Individual Learning Program (PPI). However, limited infrastructure and teacher competency remain major challenges. This research contributes to the development of inclusive and equitable Independent Learning practices for children with special needs.*

Keywords: *Independent Learning, Children with Special Needs, SLB, Special Education*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Pemenuhan hak pendidikan bagi ABK menjadi bagian penting dari komitmen nasional dalam mewujudkan pendidikan yang adil, setara, dan berkeadilan sosial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peserta didik, termasuk mereka yang memiliki hambatan fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun sensorik, memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.

Dalam praktiknya, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak dapat diselenggarakan dengan pendekatan pembelajaran yang seragam sebagaimana pada peserta didik reguler. ABK memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda secara signifikan, sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus yang bersifat adaptif, fleksibel, dan individual. Hasugian et al. (2019) menegaskan bahwa pendidikan bagi ABK harus dirancang melalui perencanaan yang sistematis, strategi pembelajaran individual, serta evaluasi berkelanjutan agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan ABK sangat dipengaruhi

oleh kemampuan sekolah dan guru dalam menyesuaikan kurikulum, metode, serta asesmen pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik.

Seiring dengan dinamika perkembangan pendidikan abad ke-21, pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan Merdeka Belajar sebagai paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Kebijakan ini menekankan fleksibilitas kurikulum, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta penguatan potensi dan kemandirian belajar. Merdeka Belajar memberikan ruang bagi satuan pendidikan dan guru untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, serta sesuai dengan kondisi nyata peserta didik dan lingkungan sekolah (Ahyar et al., 2023).

Konsep Merdeka Belajar menjadi sangat relevan dalam konteks pendidikan anak berkebutuhan khusus karena prinsip utamanya sejalan dengan kebutuhan pembelajaran ABK yang menuntut individualisasi layanan. Dalam pendidikan khusus, pembelajaran tidak dapat menekankan keseragaman capaian akademik, melainkan harus berorientasi pada perkembangan peserta didik sesuai kemampuan dan ritme belajar masing-masing. Hikmat (2022) menyatakan bahwa pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik dapat meningkatkan partisipasi belajar serta rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus, terutama apabila didukung oleh lingkungan belajar yang humanis dan inklusif.

Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai satuan pendidikan khusus memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar bagi ABK. SLB tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat layanan pembelajaran yang mengedepankan pendekatan individual melalui pembelajaran berdiferensiasi, modifikasi kurikulum, serta penggunaan asesmen yang berorientasi pada perkembangan peserta didik. Efendi et al. (2022) menegaskan bahwa modifikasi strategi pembelajaran merupakan praktik esensial dalam pendidikan ABK agar peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar sesuai hambatan dan potensinya.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Merdeka Belajar dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut meliputi keterbatasan kompetensi guru dalam memahami konsep Merdeka Belajar secara utuh, minimnya pelatihan berkelanjutan yang terintegrasi dengan pendidikan khusus, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran (Latif & Paramita, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pendidikan secara normatif dengan praktik pembelajaran di lapangan, khususnya di satuan pendidikan khusus seperti SLB.

Dalam konteks tersebut, SLB Madiun sebagai salah satu lembaga pendidikan khusus di Jawa Timur menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam menerapkan kebijakan Merdeka

Belajar. Sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan individual peserta didik, namun di sisi lain masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan dukungan sistem pendidikan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam implementasi Merdeka Belajar bagi anak berkebutuhan khusus di SLB Madiun. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan praktik penerapan Merdeka Belajar dalam pembelajaran ABK, tetapi juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik Merdeka Belajar yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SLB Madiun. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual sesuai kondisi nyata di lapangan. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru pendidikan khusus, serta peserta didik, sedangkan objek penelitian berfokus pada penerapan Merdeka Belajar yang mencakup fleksibilitas pembelajaran, strategi pengajaran, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses pembelajaran di SLB. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus (ABK) di SLB Madiun telah berjalan dengan penyesuaian yang kontekstual sesuai karakteristik peserta didik. SLB sebagai satuan pendidikan khusus memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda dibandingkan sekolah reguler, sehingga penerapan Merdeka Belajar tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus menekankan fleksibilitas, individualisasi, serta kebermaknaan proses belajar bagi peserta didik.

Implementasi Merdeka Belajar dalam Pembelajaran ABK

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, guru di SLB Madiun telah menerapkan prinsip Merdeka Belajar melalui pembelajaran yang lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran tidak lagi menuntut keseragaman capaian akademik, tetapi lebih menekankan pada perkembangan individu sesuai kemampuan dan ritme belajar masing-masing anak. Guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan minat dan potensi melalui aktivitas pembelajaran yang bersifat praktis, kontekstual, serta berorientasi pada keterampilan hidup sehari-hari.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Hasugian et al. (2019) yang menegaskan bahwa pendidikan bagi ABK harus dirancang secara fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individual peserta didik. Dalam konteks Merdeka Belajar, fleksibilitas tersebut menjadi dasar utama agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar tanpa tekanan dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

Selain itu, implementasi Merdeka Belajar juga tampak pada kebebasan guru dalam memilih metode dan strategi pembelajaran yang variatif. Guru menggunakan pendekatan berbasis aktivitas, simulasi, serta latihan keterampilan fungsional yang disesuaikan dengan hambatan dan kemampuan peserta didik. Praktik ini menunjukkan bahwa pembelajaran di SLB Madiun lebih diarahkan pada penguatan kemandirian, kemampuan sosial, serta perkembangan emosional anak, bukan hanya pada aspek akademik semata. Efendi et al. (2022) menekankan bahwa modifikasi metode pembelajaran merupakan kebutuhan esensial dalam pendidikan ABK untuk memastikan keterlibatan aktif peserta didik.

Program Pembelajaran Individual sebagai Wujud Merdeka Belajar

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Merdeka Belajar di SLB Madiun diperkuat melalui penyusunan **Program Pembelajaran Individual (PPI)**. PPI menjadi instrumen penting dalam menentukan tujuan pembelajaran, strategi pengajaran, serta bentuk evaluasi yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Guru menyusun PPI secara fleksibel dan melakukan penyesuaian berkala berdasarkan kemajuan belajar anak.

Keberadaan PPI menunjukkan bahwa Merdeka Belajar dalam pendidikan khusus tidak hanya dipahami sebagai kebijakan administratif, tetapi diterjemahkan dalam praktik pembelajaran yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan individu. Hikmat (2022) menyatakan bahwa pembelajaran individual merupakan kunci keberhasilan pendidikan anak berkebutuhan khusus karena setiap peserta didik memiliki profil kebutuhan yang unik.

Dengan demikian, PPI berfungsi sebagai bentuk nyata dari prinsip Merdeka Belajar, yaitu memberikan kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai kemampuan, tanpa dipaksakan mengikuti standar capaian yang seragam.

Faktor Pendukung Implementasi Merdeka Belajar

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan implementasi Merdeka Belajar di SLB Madiun didukung oleh beberapa faktor penting. Salah satu faktor utama adalah komitmen dan profesionalitas guru pendidikan khusus. Guru menunjukkan sikap positif dalam memahami karakteristik peserta didik serta berupaya menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan humanis. Temuan ini mendukung penelitian Hikmat (2022) yang menegaskan bahwa kompetensi dan sikap guru menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berkebutuhan khusus.

Faktor pendukung lainnya adalah dukungan kebijakan sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah. Sekolah memberikan keleluasaan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran fleksibel tanpa tekanan capaian akademik yang seragam. Dukungan manajerial ini memungkinkan guru menerapkan prinsip Merdeka Belajar secara lebih kontekstual sesuai kondisi peserta didik. Efendi et al. (2022) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh dukungan institusi sekolah.

Selain itu, lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif juga menjadi faktor penting. Hubungan yang baik antara guru dan peserta didik mendorong motivasi belajar serta meningkatkan rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus. Ahyar et al. (2023) menekankan bahwa lingkungan belajar yang suportif merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembelajaran yang humanis dan berkeadilan.

Faktor Penghambat dan Tantangan Pelaksanaan

Meskipun implementasi Merdeka Belajar di SLB Madiun telah berjalan cukup baik, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaannya. Hambatan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran bagi ABK. Pendidikan khusus membutuhkan media pembelajaran adaptif, alat bantu, serta fasilitas ramah disabilitas yang memadai. Keterbatasan tersebut menyebabkan pembelajaran fleksibel belum sepenuhnya dapat diterapkan secara maksimal.

Selain itu, sebagian guru masih menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan konsep Merdeka Belajar ke dalam praktik asesmen yang benar-benar berorientasi pada perkembangan peserta didik. Minimnya pelatihan khusus yang terintegrasi dengan pendidikan ABK juga menjadi tantangan yang signifikan. Latif dan Paramita (2023) menegaskan bahwa tanpa

dukungan pelatihan berkelanjutan, implementasi kebijakan pembelajaran fleksibel berpotensi tidak berjalan optimal.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan Merdeka Belajar secara normatif dengan realitas implementasinya di satuan pendidikan khusus. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan guru dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang mendukung layanan pembelajaran adaptif bagi anak berkebutuhan khusus.

Implikasi Implementasi Merdeka Belajar bagi Pendidikan ABK

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Merdeka Belajar memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Fleksibilitas kurikulum, pembelajaran berdiferensiasi, serta penguatan PPI mampu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, humanis, dan berkeadilan. Namun, keberhasilan implementasi tersebut sangat bergantung pada kesiapan guru, dukungan sekolah, serta ketersediaan sumber daya pendukung.

Temuan ini memperkuat pandangan Ahyar et al. (2023) bahwa transformasi pendidikan dalam kerangka Merdeka Belajar memerlukan komitmen seluruh ekosistem pendidikan agar kebijakan tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan peserta didik secara nyata, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SLB Madiun telah berjalan dengan penyesuaian yang relevan terhadap karakteristik peserta didik. Prinsip fleksibilitas kurikulum, pembelajaran berdiferensiasi, serta pendekatan individual melalui Program Pembelajaran Individual (PPI) menjadi bentuk nyata penerapan Merdeka Belajar yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai kemampuan, kebutuhan, dan ritme perkembangannya. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan pembelajaran lebih humanis, adaptif, dan berpusat pada peserta didik.

Namun demikian, implementasi Merdeka Belajar di SLB Madiun belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana pendukung, minimnya pelatihan guru yang terintegrasi dengan pendidikan khusus, serta tantangan dalam penyusunan asesmen yang benar-benar berorientasi pada perkembangan individu peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi guru, dukungan kebijakan sekolah yang berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas pembelajaran adaptif agar Merdeka Belajar dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkeadilan bagi anak berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, M., Rasidi, & Nuruddin. (2023). *A review of Indonesian inclusive education research in elementary school: From 2015–2022*. Walada: Journal of Primary Education.
- Efendi, M., Pradipta, R. F., Dewantoro, D., Ummah, U. S., Ediyanto, & Yasin, M. (2022). Inclusive education for student with special needs at Indonesian public schools. *International Journal of Instruction*.
- Hasugian, J. W., Gaurifa, S., Warella, S. B., Kelelufna, J. H., & Waas, J. (2019). Education for children with special needs in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*.
- Hikmat. (2022). Implementation of inclusive education for children with special needs in Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Latif, H. N. M., & Paramita, P. (2023). Constraints and strategies for inclusive education in Indonesia at the primary school level: A literature review. *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology*.
- Nabiela, H. S., & Ulfatin, N. (2023). Inclusive education policy in Indonesia: Best practices, challenges, and future directions. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*.